



# PEMERINTAH DAERAH BUTON UTARA

## INPEKTORAT

### IKU dan Logikal Frame Work Resntra



Copyright © 2011 by PT. INDOARANG GARA



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Kompleks Perkantoran Sara'ea Kode Pos : 93672  
**B U R A N G A**

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH BUTON UTARA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 – 2021**

**DI LINGKUNGAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH BUTON UTARA**

**INSPEKTUR DAERAH BUTON UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan nasional yang integral dengan penetapan indikator kinerja yang terukur dan spesifik serta dilaksanakan secara konsisten;
- b. Bahwa adanya revisi RPJMD Buton Utara Tahun 2016-2021 berdampak pada revisi Renstra Inspektorat Daerah Buton Utara tahun 2016-2021 sehingga diperlukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), demi konsistensi dokumen perencanaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Buton Utara tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kerja Inspektorat Daerah Buton Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 16);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Buton Utara tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Pedoman Penetapan Target Kinerja Tahunan yang selanjutnya terformulasikan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan;
  - c. Pedoman Penetapan Rencana Aksi Kinerja Tahunan;
  - d. Pedoman Evaluasi Kinerja Secara Berkala;
  - e. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- KETIGA :** Keputusan ini agar dipedomani seluruh Pegawai Negeri Sipil Lingkup Inspektorat Daerah Buton Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan internal;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sekaligus mencabut pemberlakuan Keputusan Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kerja Inspektorat Daerah Buton Utara.

Ditetapkan : Di Buranga  
Pada tanggal : 11 Februari 2020



**YUSMAN FARMANTA, SE., Ak., CA**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19670420 198703 1 001

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Buton Utara  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Di Lingkungan Kerja Inspektorat Daerah Buton Utara  
Nomor : 18  
Tanggal : 11 Februari 2020

## Lampiran I Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Buton Utara

### A. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Buton Utara bertugas membantu Bupati dalam hal pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah.

### B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evalausi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.



INSPEKTUR,

YUSWAN FARMANTA, SE., Ak.,CA

Bimbina Tk.I, IV/b

NIP. 19670420 198703 1 001

Lampiran II

Keputusan Inspektur Daerah Buton Utara

Nomor : 18

Tanggal : 11 Februari 2020

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kerja Inspektorat Daerah Buton Utara

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH BUTON UTARA**

Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD		Formulasi	Satuan	Target Tahunan RPJMD						Penanggungjawab	Sumber Data	
Tujuan Renstra		Sasaran Renstra				Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Renstra							Kondisi Akhir (2021)
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator			2017	2018	2019	2020	2021				
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	- Opini BPK	Disclaimer = 25%, Tidak Wajar = 50%, WDP = 75%, WTP = 100%	Kategori	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektur	LHP BPK
			- Nilai LKJIP	AA Skor >90 -100, A = >80 - 90, BB=>70 - 80, B=>60 - 70, CC= >50 - 60, C=>30 - 50, D=0 - 30	Kategori	C	CC	B	BB	BB	BB	BB	Inspektur	LHE Kemenpan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	- Opini WTP - Nilai LKJIP "BB"	Meningkatnya Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal	- Opini BPK	Disclaimer = 25%, Tidak Wajar = 50%, WDP = 75%, WTP = 100%	Kategori	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor	LHP BPK
			Persentase Tindak Lanjut Temuan LHP BPK Berkategori sesuai	Jumlah rekomendasi tertindaklanjuti tahun berkenan dibagi Total rekomendasi tahun Sampai Dengan Tahun Berkenan dikali 100%	%	59%	70%	75%	79%	82%	85%	85%	Sekretaris/Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Pemnatuan Tindak Lanjut Semesteran
			Persentase Level Kapabilitas APIP	Lvl 5 = 100%, Lvl 4 = 75%, Lvl 3 = 50%, Lvl 2 = 25%, dan Lvl 1 = 0%	%	0%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	Sekretaris	LHE BPK
			Persentase Level Maturitas SPIP	Lvl 5 = 100%, Lvl 4 = 80%, Lvl 3 = 60%, Lvl 2 = 40%, Lvl 1 = 20%, dan Lvl 0 = 0%	%	0%	20%	40%	60%	60%	80%	80%	Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor	Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor
			Nilai LAKIP	AA Skor >90 -100, A = >80 - 90, BB=>70 - 80, B=>60 - 70, CC= >50 - 60, C=>30 - 50, D=0 - 30	Kategori	C	CC	B	BB	BB	BB	BB	Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor	Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor
			Persentase OPD dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal BB	Jumlah OPD dengan Hasil Evaluasi Sakip BB dibagi Jumlah OPD dikali 100%	%	0%	50%	60%	70%	85%	100%	100%		

Buton, 11 Februari 2020

Inspektur Daerah Buton Utara



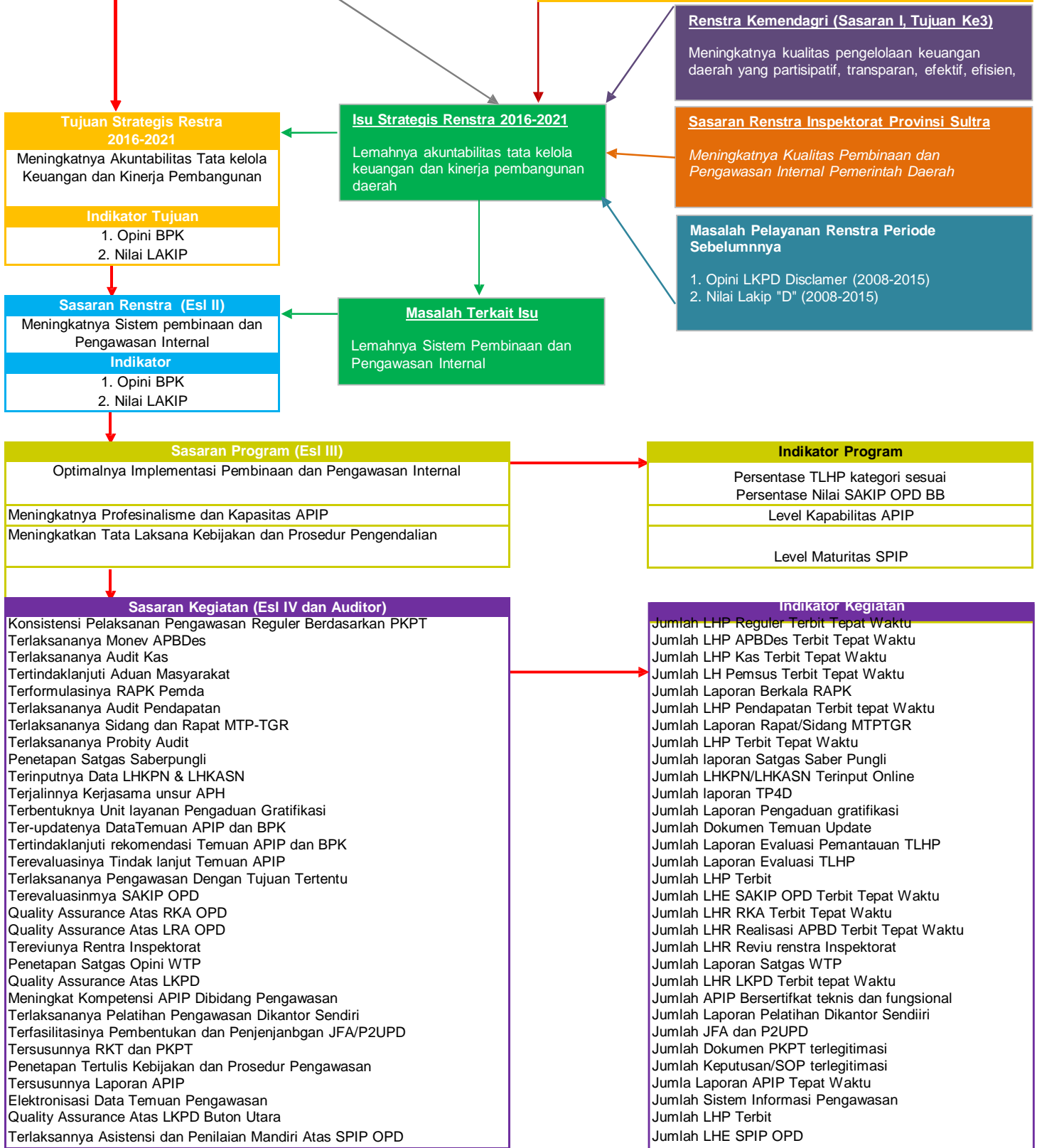
YUSUF FARMANTA, SE., Ak.,CA  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19670420 198703 1 001



**LOGIKAL FRAME WORK RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH BUTON UTARA**

RPJMD	
<b>Visi</b>	Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera"
<b>Misi</b>	Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) & pemerintahan yang bersih (clean governance)
<b>Indikator</b>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>
<b>Sasaran</b>	1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan
<b>Indikator</b>	1. IKM 2. Opini BPK 3. Nilai LAKIP

RPJMN	
<b>Agenda Prioritas Ke-2 Pembangunan Nasional</b>	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
<b>Sasaran I Bidang Aparatur Negara</b>	Birokrasi yang bersih dan akuntabel <b>Indikator</b> - Opini WTP - Tingkat Kapabilitas APIP - Tingkat Maturitas SPIP - Skor B Atas SAKIP
<b>Sasaran II Bidang Aparatur Negara</b>	Birokrasi yang Efektif dan Efisien <b>Indikator</b> - Indeks reformasi birokrasi



**INSPEKTORAT DAERAH BUTON UTARA CASCADING  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021**

CASCADING IKU INSPEKTORAT TERHADAP IKU DAERAH														CASCADING IKP ES. III TERHADAP IKU OPD							CASCADING IKP ES. IV TERHADAP IKP ES. III																
RPJMD								RENSTRA						Target Kinerja							Target Kinerja																
Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Strategi	Kebijakan	Program	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Awl	Target Kinerja					Ahr
			2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021							2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pembangunan	Opini WTP	Tdk Wjrr	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal	Opini WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya Implementasi Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Internal	Melaksanakan Pengawasan Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan LHP BPK Berkategori sesuai	59%	70%	75%	79%	82%	85%	85%	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	40	40	112	41	41	41	315		
																											Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Jumlah LHE Terbit tepat Waktu	18	18	0	0	0	0	36		
																											Probit Audit	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	0	0	0	2	2	2	6		
																											Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	5	7	7	10	10	10	49		
																											Pengawasan Pengelolaan APBDes	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	0	0	0	60	60	72	192		
																											Pengawasan Pengelolaan Dana BOS	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	0	0	0	24	30	42	96		
																											Pengawasan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	0	0	0	8	12	12	32		
																											Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan serta Laporan Akhir Tahun	Jumlah LHP Terbit tepat Waktu	6	8	8	12	12	12	58		
																											Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan	3	3	3	5	5	5	24		
																											Review Rencana Kerja Anggaran	Jumlah LHR terbit	10	12	12	16	16	16	82		
																											Reviu Renstra Inspektorat Secara Berkala	Jumlah LHR Berkala	0	0	0	1	1	1	3		
																											Mengoptimalkan Monitoring Tindak lanjut temuan pengawasan	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Dokumen Update temuan	4	4	4	4	4	4	24	
																												Tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemantauan Tindak	2	2	2	2	2	2	12	
																												Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Evaluasi Tindak	0	0	0	2	2	2	6	
																												Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah SKTJM Terbit	15	15	15	15	15	15	90	
																											Mengoptimalkan Pendampingan dan reviu LKPD	Workshop Pendampingan dan Review LKPD	Jumlah LHR LKPD	0	0	0	2	2	2	6	
																												Satgas Percepatan Pencapaian Opini WTP	Jumlah Laporan Satgas	0	0	2	2	2	2	8	
																												Reviu Realisasi APBD Secara	Jumlah LHR	0	0	0	0	0	0	0	
																											Mengoptimalkan kerjasama antar lembaga terkait pencegahan dini terhadap korupsi	Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan	0	0	0	0	0	0	0	
																												Penyenggaraan dan Pemantauan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah laporan	0	1	2	2	2	2	9	
	Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah laporan	0	0	2	2	2	2	8																												
	Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	Jumlah laporan	0	0	0	10	10	10	30																												
	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi / Tim Kosupgah KPK	Jumlah laporan	0	1	4	4	4	4	17																												
	Penilaian Mandiri Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan	0	0	0	16	16	16	48																												
	Penyenggaraan LHKPN dan LHKASN	Jumlah LKH-PNLHKASN	0	0	400	400	400	400	1600																												

CASCADING IKU INSPEKTORAT TERHADAP IKU DAERAH																	CASCADING IKP ES. III TERHADAP IKU OPD							CASCADING IKP ES. IV TERHADAP IKP ES. III													
RPJMD									RENSTRA																												
Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Strategi	Kebijakan	Program	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Awl	Target Kinerja					Ahr
			2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021							2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021	
	Nlai LAKIP	D	B	B	BB	BB	BB	BB	SDA	Nlai LAKIP	D	B	B	BB	BB	BB	BB	Sda	Mengoptimalkan Evaluasi SAKIP OPD	Sda	Persentas e.Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP berkategori	0%	50%	60%	70%	85%	100%	100%	Evaluasi SAKIP dan LAKIP	Jumlah LHE SAKIP OPD	0	17	20	24	33	33	127
SDA	SDA								SDA	SDA								Meningkatkan Profesionalisme dan Kapasitas Tenaga Pengawas	Meningkatkan Jumlah JFA dan P2UPD	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	Level Kapabilitas APIP	0%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	Jumlah APIP Bersertifikat Diklat	9	6	5	16	16	16	59
																		Meningkatkan Tata Laksana Kebijakan dan Prosedur Pengendalian	Melaksanakan penilaian Mandiri Perumusan dan penetapan SOP	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	Level Maturitas SPIP	0%	20%	40%	60%	60%	80%	80%	Penyelenggaraan dan Penilaian Mandiri SPIP	Jumlah LHE	0	0	0	33	33	33	99
																		Penetapan PKPT										Asistensi Pengkajian dan Penyusunan Standar Operating	Jumlah SOP	5	0	0	0	0	0	0	
																		Koordinasi Pengawasan secara komprehensif										Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) / PKPT	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2	2	10	
																												Penyusunan Laporan APIP	Jumlah Laporan	2	2	2	2	2	2	10	
																												Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Elektronik	0	0	0	0	1	1	2	
																												Probit Audit	Jumlah LHP	2	2	1	0	0	0	3	
																												Workshop dan Pendampingan	Jumlah Laporan	1	1	1	0	0	0	2	
																												Penyusunan Indikator Kinerja	Jumlah Laporan	1	0	0	0	0	0	0	
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	IKM	C	B	B	B	B	B	B	Tenwujudnya Manajemen Organisasi Yang Profesional	% Kecukupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Meningkatkan Tata Laksana Kedinasan	Penetapan SOP Pengelolaan Administrasi Kedinasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%e Tertib Penatausahaan Persuratan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	300	400	400	400	400	400	2.300	
																												Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	75	75	75	75	75	75	75	
																												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar	25500	21250	0	20642	25500	25500	143892	
																												Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	10	10	5	5	5	5	5	
																												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	5	1	5	2	3	2	7	
																												Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis	0	6	0	4	4	4	18	
																												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis	2	2	2	2	2	2	2	
																												Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang	39	33	30	36	42	48	228	
																												Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah SPPD	42	50	45	49	49	49	284	
																												Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah SPPD	42	43	32	47	50	52	266	
																												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan	4	4	4	3	3	3	3	
																												Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan	Jumlah Orang	16	16	16	16	16	16	16	
																												Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah Orang	7	7	7	7	7	7	7	
																												Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah kendaraan	18	18	18	21	23	26	26	
																												Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Halaman Kantor	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	625 M <sup>2</sup>	
																												Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jenis Peralatan Kerja	5	5	5	5	6	5	6	



CASCADING IKU INSPEKTORAT TERHADAP IKU DAERAH																	CASCADING IKP ES. III TERHADAP IKU OPD						CASCADING IKP ES. IV TERHADAP IKP ES. III														
RPJMD										RENSTRA																											
Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Strategi	Kebijakan	Program	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Awl	Target Kinerja					Ahr
			2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021							2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021	
sda								sda								Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang Operasional perkantoran	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBU dan RKPBU	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Saprasi Dalam Kondisi Baik Dari Total Saprasi	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%		Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis	7	1	2	2	2	2	16	
															Pemenuhan sarana mobilitas kegiatan pengawasan lapangan												Pengadaan Komputer	Jumlah Jenis	1	3	3	1	2	2	4		
															Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana yang telah ada;												Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit	1	1	0	3	3	3	3		
															Meningkatkan pengamanan sarana dan prasarana operasional baik secara administrasi maupun fisik												Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	18	18	18	18	22	26	26		
																										Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Jenis	0	0	0	2	3	3	3			
																										Pembangunan gedung kantor	Jumlah Unit	3	0	0	0	1	2	6			
																										Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	2	2	2	2	2	2	2			
																										Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit	0	0	1	0	0	0	1			
																										Penataan Halaman Kantor	Luas Halaman	0 M2	0	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2			
																										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit	3	1	0	3	4	4	15			
																										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis	0	0	1	0	1	0	2			
																Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai	Menetapkan SOP terkait Ijin, Sakit dan Cuti	Program Peningkatan Disiplin Aparatu	% ASN Dengan Rata-Rata Kehadiran Minimal 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel	0	34	34	36	42	48	194	
																Pemenuhan keseragaman kerja kedinasan											Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Stel	0	55	49	56	68	80	308		
																Absensi harian Pegawai secara Digital																					
																Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur	Memfasilitasi Perolehan sertifikat ujian kedinasan pejabat struktural	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN Yang Mengikuti Diklat, Bimtek	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Orang	0	0	0	1	2	0	3	
																											Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	0	0		
																Meningkatkan profesionalisme PNS											Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang	14	9	8	10	10	10	61		

CASCADING IKU INSPEKTORAT TERHADAP IKU DAERAH														CASCADING IKP ES. III TERHADAP IKU OPD							CASCADING IKP ES. IV TERHADAP IKP ES. III																
RPJMD										RENSTRA																											
Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Sasaran	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Strategi	Kebijakan	Program	Indktr	Awl	Target Kinerja					Ahr	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Awl	Target Kinerja					Ahr
			2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021							2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021	
								Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas	Nilai Lakip							Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melekat secara	Penetapan SOP sesuai uraian tugas dan fungsi teknis pada aspek perencanaan, keuangan dan pelaporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat	C	B	BB	BB	A	A	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Semesteran	0	0	0	12	12	12	36		
																		Penyusunan Standar Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)								Jumlah Dokumen	0	0	5	5	5	5	20				
																		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran								Jumlah Laporan	1	1	1	1	1	1	6				
																		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun								Jumlah Laporan	1	1	1	1	1	1	6				
																		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)								Jumlah Laporan	1	1	1	1	1	1	6				
																		Mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan yang terpadu pada setiap tingkatan eselon III	Program Perencanaan Organisasi	Nilai Evaluasi Sakip	C	B	BB	BB	A	A	A	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah Dokumen	1	0	1	0	0	0	2	
																										Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	6			
																										Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	6			
																										Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	6			
																										Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	6			



## INSPEKTORAT DAERAH BUTON UTARA

### Visi RPJMD

Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera”

### Misi Ketiga RPJMD

Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (good governance).

### TUJUAN MISI KETIGA RPJMD

Urian Tujuan	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	CC	CC	B	B

### SASARAN STRATEGIS TUJUAN MISI KETIGA RPJMD

Urian Tujuan	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	C	B	B	B	B	B
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Penilaian LAKIP		CC	B	B	B	B	B

### TUJUAN RENSTRA INSPEKTORAT

Urian Tujuan	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Opini BPK atas laporan keuangan	Kategori	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Penilaian LAKIP		CC	B	B	B	B	B

Berlanjut Ke Halaman Berikutnya

Cascading Renstra Inspektorat Daerah Buton Utara

Tujuan								
Meningkatnya Akuntabilitas Tata kelola Keuangan dan Kinerja Pembangunan								
Indikator								
Opini WTP Nilai LAKIP								
Satuan	Awal	Target Tahunan					Ahir	
		1	2	3	4	5		
WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
D	C	B	BB	BB	BB	BB	BB	

Tujuan								
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat								
Indikator								
Indeks Kepuasan Masyarakat								
Satuan	Awal	Target Tahunan					Ahir	
		1	2	3	4	5		
C	B	B	B	B	B	B	B	

Sasaran Strategis	
Meningkatnya Sistem pembinaan dan Pengawasan Internal	

Sasaran Penujng	
Meningkatnya Layanan Tata Laksana Kedinesan	

Indikator							
Opini BPK							
Satuan	Awal	Target Tahunan					Ahir
		2017	2018	2019	2020	2021	
Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator							
Nilai LAKIP Pemda							
Satuan	Awal	Target Tahunan					Ahir
		2017	2018	2019	2020	2021	
Predikat	CC	B	B	BB	BB	BB	BB

Indikator							
Indeks Kepuasan Masyarakat							
Satuan	Awal	Target Tahunan					Ahir
		1	2	3	4	5	
Predikat	C	B	B	B	B	B	B

Program Strategis I							
Program peningkatan profesionalisme APiP							
Sasaran Program							
Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas APiP							
Indikator Program I							
Level Kapabilitas APiP							
Formulasi Indikator							
Lvl 5 = 100%, Lvl 4 = 75%, Lvl 3 = 50%, Lvl 2 = 25%, dan Lvl 1 = 0%							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0	25	25	50	75	75	75

Program Strategis II							
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur							
Sasaran Program							
Meningkatkan Tata Laksana Kebijakan dan Prosedur Pengendalian							
Indikator Program I							
Level Maturitas SPIP							
Formulasi Indikator							
Lvl 5 = 100%, Lvl 4 = 80%, Lvl 3 = 60%, Lvl 2 = 40%, Lvl 1 = 20%, dan Lvl 0 = 0%							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0	40	40	60	60	80	80

Program Strategis III							
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
Sasaran Program							
Optimalnya Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Internal							
Indikator Program I							
Persentase TLHP kategori sesuai							
Formulasi Indikator							
Jumlah rekomendasi Tertindaklanjuti Thn berkenan dibagi Total Rekomendasi s/d Thn berkenan dikali 100%							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	59	70	75	79	82	85	85

Program							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
Sasaran Program Meningkatnya							
Tata Laksana Operasional penunjang perkantoran							
Indikator Program I							
Persentase Tertib Penatausahaan Persuratan							
Formulasi Indikator							
Jumlah Realisasi Surat Masuk dan Keluar tertangani dibagi jumlah surat masuk dan keluar setahun dikali 100%							
Sat	Awal	Target					Ahir
%	100	100	100	100	100	100	100

Program							
Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Sasaran Program Meningkatnya							
Tata Laksana Operasional penunjang perkantoran							
Indikator Program I							
Persentase Laporan Aset Dalam Kondisi Baik							
Formulasi Indikator							
Jumlah Laporan Aset tetap Waktu Dibagi Dengan Total laporan yang dipenuhi di kali 100%							
Sat	Awal	Target					Ahir
%	100	100	100	100	100	100	100

Kegiatan Prog Strategis I		Indikator	Satuan	Awal	Target					Ahir
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah APiP Bersertifikat Diklat Teknis Pengawasan	Org	9	6	5	16	16	16	59	
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas	Jumlah Laporan PKS	Lap	0	0	10	10	10	40	40	
Pendidikan & Pelatihan Auditor	Jlh APiP bersertifikat JFA, PZLUPD	Org	5	5	9	9	9	46	46	
Kegiatan Program Strategis II		Indikator	Satuan	Awal	Target					Ahir
Penilaian Mandiri SPIP	Jumlah LHE		0	0	0	33	33	33	99	
Penyusunan kebijakan/SOP	Jlh Kebijakan Tertulis		0	0	0	10	10	10	30	
Pengkajian dan Penyusunan Standar Operatif	Jumlah SOP		5	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan RKT / PKPT	Jumlah Dokumen		2	2	2	2	2	2	10	
Penyusunan Laporan APiP	Jumlah Laporan		0	2	2	2	2	2	10	
SIM Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem		0	0	0	1	1	2	2	

Kegiatan Prog Strategis III		Indikator	Satuan	Awal	Target					Ahir
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah LHP	Lap	40	40	112	41	41	41	315	
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Jumlah LHE	Lap	18	18	0	0	0	0	36	
Probit Audit	Jumlah LHP	Lap	0	0	0	2	2	2	6	
Pemangan kasus pengaduan di lingkungan pengelolaan APBD	Jumlah LHP	Lap	5	7	7	10	10	49	49	
Pengawasan Pengelolaan Dana BOS	Jumlah LHP	Lap	0	0	0	60	60	72	192	
Pengawasan Pendapatan dan Retribusi Daerah	Jumlah LHP	Lap	0	0	0	24	30	42	96	
Pengawasan Pengelolaan Keuangan	Jumlah LHP	Lap	6	8	8	12	12	12	58	
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan	Lap	3	3	3	5	5	5	24	
Review Rencana Kerja Anggaran	Jumlah LHR	Lap	10	12	12	16	16	16	82	
Reviu Renstra Inspektorat	Jumlah LHR	Lap	0	0	0	1	1	1	3	
Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Dokumen	Dok	4	4	4	4	4	4	24	
Tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Dok	2	2	2	2	2	2	12	
Evaluasi berkala temuan hasil	Jumlah LHE	Lap	0	0	0	2	2	2	6	
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah SKTJM Terbit	Srt	15	15	15	15	15	15	90	
Review LKPD	Jumlah LHR	Lap	0	0	0	2	2	2	6	
Satgas Percepatan Opini WTP	Jumlah Laporan	Lap	0	0	2	2	2	2	8	
Reviu Realisasi APBD Secara Berkala	Jumlah LHR	Lap	0	0	0	0	0	0	0	
Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan	Lap	0	0	0	0	0	0	0	
Penyelenggaraan Saber Pungli	Jumlah laporan	Lap	0	1	2	2	2	2	9	
Tp4D	Jumlah laporan	Lap	0	0	2	2	2	2	8	
Pelayanan Pengaduan Gratifikasi	Jumlah laporan	Lap	0	0	0	10	10	10	30	
RAPK / Tim Kosurpgah KPK	Jumlah laporan	Lap	0	1	4	4	4	4	17	
Penilaian Mandiri Implementasi RB	Jumlah laporan	Lap	0	0	0	16	16	16	48	
Penyelenggaraan LHKPN LHKASN	Jumlah laporan	Lap	0	0	0	400	400	400	1600	
Evaluasi SAKIP dan LAKIP	Jumlah LHE/LHR	Lap	0	17	20	24	33	33	127	

Program							
Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
Sasaran Program							
Meningkatnya Disiplin Kehadiran PNS							
Indikator Program I							
Persentase Kehadiran PNS Minimal 85% Setahun							
Formulasi Indikator							
Jlh ASN Dgn kehadiran min 85% dibagi Jlh ASN dikali 100%							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0%	100	100	100	100	100	100

Program							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
Sasaran Program							
Meninmgkatnya Kapasitas SDM							
Indikator Program I							
Persentase Jlh Pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya							
Formulasi Indikator							
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Dibagi Jumlah ASN dikali 100%							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0	100	100	100	100	100	100

Program							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
Sasaran Program							
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal							
Indikator Program I							
Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat							
Formulasi Indikator							
LHE Evaluator APiP							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0%	100	100	100	100	100	100

Program							
Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah							
Sasaran Program							
Meningkatnya Kualitas Perencanaan							
Indikator Program I							
Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat							
Formulasi Indikator							
LHE Evaluator APiP							
Satuan	Awal	Target					Ahir
%	0%	100	100	100	100	100	100